

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pesat yang dialami oleh perbankan syari'ah merupakan bentuk respon positif bagi perekonomian Islam di tengah masyarakat. Secara kelembagaan, perbankan syari'ah di Indonesia dapat dipetakan menjadi Bank Umum Syari'ah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS). Baitul Mal Wat Tamwil pada dasarnya adalah lembaga keuangan non bank atau lembaga keuangan mikro syari'ah yang menjalankan sebagian besar sistem operasional perbankan syari'ah.¹

Pada dataran hukum Indonesia, badan hukum yang paling tepat untuk BMT adalah koperasi, baik serba usaha maupun simpan-pinjam, dan sekarang telah diatur dalam keputusan Menteri No. 91/kep/M.KUKM/IX/2004 dengan badan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS). Legalitas nasionalnya mengikuti ketentuan Perundang-undangan yang terkait dengan koperasi, yaitu peraturan Perundang-undangan yang sangat mendasar adalah Undang-Undang Nomer 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, didalamnya menjelaskan bahwa UU 1992 menyatakan perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.²

Undang-undang koperasi juga menegaskan bahwa pemberian status hukum koperasi, pengesahan perubahan anggaran dasar, dan pembinaan koperasi merupakan

¹ Lasmiatun, *Perbankan Syari'ah*, Semarang: LPSDM. RA Kartini, 2010, h. 20-21

² Dadan Mutaqqin, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2008, h.

wewenang dan tanggung jawab pemerintah. Sedangkan dalam pelaksanaannya, pemerintah melimpahkan wewenang tersebut kepada menteri yang membidangi koperasi. Yaitu Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KKUKM). Lebih detail peraturan koperasi BMT diatur dengan Keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah No. 91 Tahun 2004 (Kepmen No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004).³

Dalam Kepmen tersebut memuat bahwa koperasi BMT disebut sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS). Adapun pengertian KJKS, sebagaimana disebutkan dalam Kepmen No. 91/kep/M.KUKM/IX/2004, merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syari'ah).⁴

Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) merupakan badan usaha yang salah satu usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Seiring dengan hal tersebut di atas, Lembaga Keuangan Syariah yang ruang lingkupnya mikro yaitu KJKS juga semakin menunjukkan eksistensinya. Seperti halnya bank syari'ah, kegiatan KJKS adalah melakukan penghimpunan (prinsip *wadiah* dan *mudharabah*) dan penyaluran dana (prinsip bagi hasil, jual beli dan *ijarah*) kepada masyarakat.

Menurut Undang-Undang No.7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan

³ Pedoman Cara Pembuatan BMT, Jakarta: PINBUK, ct, h. 6

⁴ *Ibid*, h. 39

persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁵

Pembiayaan tidak terlepas dari fungsi dan aktifitas BMT karena meskipun terdapat bermacam produk yang ditawarkan BMT, pembiayaan masih merupakan prioritas kegiatan operasional BMT. Dalam pemberian pembiayaan terdapat beberapa unsur risiko yaitu adanya ketidakpastian yang dapat menghambat kelancaran pengembalian pembiayaan.

Penyelewengan mudah timbul sejak pembiayaan itu disalurkan oleh BMT kepada anggota sampai dengan pembiayaan itu dibayar lunas oleh anggota. Oleh karena itu tugas BMT tidak hanya berhenti pada pemberian pembiayaan saja tetapi BMT masih harus melakukan pengawasan mulai dari pembiayaan itu diberikan sampai dengan pembiayaan dibayar lunas oleh anggota. Apabila dalam pemberian pembiayaan itu BMT kurang memperhatikan aspek pengawasan, maka segala permasalahan yang timbul baru akan di ketahui setelah masalah tersebut menjadi berat dan sulit untuk diatasi. Akibat dari keadaan tersebut kualitas pembiayaan yang diberikan menjadi buruk. Adanya pembiayaan bermasalah apalagi bila pembiayaan tersebut sudah ada pada pembiayaan macet akan membutuhkan banyak waktu, tenaga dan dana BMT untuk menyelamatkannya.⁶

⁵ S Setiawan, (ed.), *Perbankan Syariah*, Yogyakarta: TrustMedia, 2009, cet. 1, h. 10

⁶ Emi Nurhayati, *Dalam Skripsi yang Berjudul: Pelaksanaan Pengawasan Murabahah Sebagai Upaya Untuk Meminimalkan Pembiayaan Bermasalah*, UIN Malang, 2010, h. 19-20

Kesadaran akan memahami risiko dengan baik sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk mengoptimalkan keuntungan inilah yang menjadi dasar terbentuknya konsep manajemen risiko khususnya manajemen risiko pembiayaan yang akhir-akhir ini semakin mengemuka di dalam dunia *of rimidial* bisnis, khususnya di industri keuangan (perbankan dan lembaga keuangan lainnya).

Berbicara mengenai risiko pembiayaan KJKS BINAMA Semarang mempunyai kompleksitas risiko pembiayaan yang tinggi hal ini Berdasarkan hasil penelitian awal yang peneliti lakukan pada tanggal 23 Juni 2014 pada bagian *head* dan *collecting* department di KJKS BINAMA yaitu Bpk. Tur Priyono SE, jumlah mitra dan *outstanding* pembiayaan dari tahun 2009 – 2013 adalah sebagai berikut :

Table 1
Jumlah mitra dan outstanding pembiayaan
Di KJKS BINAMA tahun 2009 – 2013

No.	Tahun	Mitra	Outstanding pembiayaan	%
1.	2009	1,689	17,699,125,563	100%
2.	2010	1,956	21,391,530,853	20,86%
3.	2011	2,310	30,368,820,996	41,96%
4.	2012	2,608	35,475,809,331	16,81%
5.	2013	2,891	49,130,967,560	38,49%

Sumber : Sumber: Bagian administrasi KJKS BINAMA dan diolah oleh peneliti.

Dapat dilihat data di atas, dari tahun 2009 meningkat 20,86% pada tahun 2010 dengan jumlah anggota 1956, tahun 2011 meningkat 41,96% dengan jumlah anggota 2310, tahun 2012 meningkat 16,81% dengan jumlah anggota 61,81% dengan jumlah anggota 2608, sampai tahun 2013 meningkat 38,49% dengan jumlah anggota 2891. Artinya KJKS BINAMA Semarang mengalami peningkatan pemberian pembiayaan,

dengan jumlah pembiayaan yang semakin besar, maka tingkat risiko yang dihadapi oleh KJKS BINAMA Semarang juga semakin besar dan semakin kompleks. Dengan demikian KJKS BINAMA Semarang harus mampu melakukan manajemen risiko secara tepat agar likuiditas KJKS tetap terjaga. Likuiditas lembaga keuangan non bank diartikan sebagai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang harus segera dibayar. Kewajiban tersebut sering di artikan sebagai hutang.⁷ Sebagai lembaga kepercayaan, KJKS BINAMA Semarang harus sanggup menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk memperoleh profit yang wajar.

Sebagai lembaga *intermediary* dan seiring dengan situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan mengalami perkembangan pesat, bank syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis risiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak *negative* terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak bisa dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu sebagai lembaga perbankan pada umumnya, bank syariah juga memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan

⁷Taswan, S.E., M.Si. *Manajemen Perbankan*, Jl. Palagan Tentara Pelajar Km. 7 yogyakarta; UPP STIM YKPN YOGYAKARTA, 2006, cet. Pertama, h. 97.

risiko yang timbul dari kegiatan usaha, atau yang biasa disebut sebagai manajemen risiko.⁸

Risiko pembiayaan yang dihadapi oleh KJKS BINAMA Semarang merupakan salah satu risiko yang perlu dikelola secara tepat karena kesalahan dalam pengelolaan risiko pembiayaan dapat berakibat fatal pada peningkatan NPF (*Non Performance Financing*). NPF adalah pembiayaan yang tidak diikuti oleh pelunasan pembayaran pokok atau angsuran sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam perjanjian sehingga ada kemungkinan potensial kerugian (*loss*).⁹

Dengan berbagai macam risiko tersebut, maka KJKS BINAMA Semarang dituntut untuk melakukan manajemen risiko pembiayaan seefektif mungkin agar likuiditas KJKS tetap terjaga sehingga KJKS tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Berdasarkan uraian yang penulis paparkan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dengan melakukan penelitian dengan judul "IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN DALAM UPAYA MENJAGA LIKUIDITAS BMT SYARIAH. Studi Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Binama Tlogosari Semarang".

⁸ Ir. Adiwirman A.karim, S.E, M.B.A,M.A.E.P., *BANK ISLAM analisis fiqih dan keuaangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, h. 255

⁹Dian rosalia pradini, *dalam skripsinya yang berjudul : Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Dan Pengaruhnya Terhadap Laba (studi kasus pt. Bank muamalat indonesia, tbk)*, IPB Bogor, 2011, h.68

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang penulis paparkan di atas, secara spesifik penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan:

1. Bagaimanakah implementasi manajemen risiko pembiayaan yang diterapkan di KJKS BINAMA Semarang?
2. Bagaimana manajemen risiko pembiayaan dalam upaya menjaga likuiditas KJKS BINAMA Semarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui implementasi manajemen risiko pembiayaan yang diterapkan di KJKS BINAMA Semarang?
- b. Untuk mengetahui manajemen risiko pembiayaan dalam upaya menjaga likuiditas KJKS BINAMA Semarang?

c. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

- a. Bagi KJKS BINAMA Semarang

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi KJKS BINAMA Semarang khususnya manajemen risiko pembiayaan dalam upaya menjaga likuiditas KJKS.

b. Bagi anggota KJKS BINAMA Semarang

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi masyarakat bahwa kerjasama itu perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kontrak kerja, karna pada hakikatnya manusia harus bisa menjaga amanah yang diberikan pada orang tersebut.

c. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan bagi peneliti, dan dari penelitian ini peneliti berharap bisa memperkaya pengetahuan tentang ekonomi Islam khususnya pada lembaga keuangan syari'ah yaitu tentang manajemen risiko pembiayaan dalam upaya menjaga likuiditas yang dapat terjadi di dalamnya.

D. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut penulis melakukan penelaahan karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti dengan judul IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN DALAM UPAYA MENJAGA LIKUIDITAS KJKS SYARIAH.

Tujuan adanya telaah adalah untuk menghindari adanya plagiasi atau pengulangan dalam penelitian ini, sehingga tidak terjadi adanya pembahasan yang sama dengan penelitian yang lain. Maka penulis perlu menjelaskan tentang topik penelitian yang penulis teliti yang berkaitan dengan masalah tersebut berupa kajian dan pembahasan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dian rosalia pradini (2011), **Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Dan Pengaruhnya Terhadap Laba (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk)**. Hasil penelitian ini adalah :
 - a. Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko pembiayaan diantaranya faktor internal perusahaan (SDM, teknologi informasi, kebijakan dan prosedur keuangan, serta pengendalian *internal*) dan faktor *eksternal* (kebijakan pemerintah, peminjam, dan persaingan dengan bank lain).
 - b. Manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan untuk mengendalikan dan mengelola risiko dengan cara *preventive control of finance* (penetapan prosedur dan kebijakan pembiayaan, asuransi, peningkatan kualitas SDM, penagihan secara intensif, dan manajemen kolektibilitas) dan *repressive control of finance* (proses revitalisasi dan penyelesaian melalui jaminan baik secara non litigasi maupun litigasi).
 - c. Pembiayaan pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk terus mengalami peningkatan dengan persentase rata-rata sebesar 5,54% selama periode 2007-2010 yang didominasi oleh pembiayaan *murabahah* dengan persentase rata-rata terhadap total pembiayaan sebesar 44,70%. Selanjutnya *musyarakah* 27,98%, *mudharabah* 20,74%, *ijarah* 3,29%, *qard* 2,01%, dan *istishna* 1,28%. Sedangkan NPF dan laba mengalami fluktuasi pada periode yang sama dimana NPF tertinggi terjadi pada triwulan ke tiga 2009 sebesar 8,86% dan terendah pada triwulan terakhir tahun 2007 sebesar 2,91%. Pertumbuhan laba terbesar terjadi pada triwulan pertama tahun 2008 yaitu sebesar 37,89% dan terendah pada triwulan ketiga tahun 2009 sebesar 18,66% .

- d. Berdasarkan hasil regresi, pembiayaan memberikan pengaruh positif terhadap laba dengan koefisien 0,0257, yang berarti setiap kenaikan pembiayaan sebesar 1 miliar rupiah akan menaikkan perolehan laba sebesar 0,0257 miliar rupiah. Sedangkan NPF memberikan pengaruh negatif terhadap laba dengan koefisien -2147 yang berarti, kenaikan NPF sebesar 1% akan menurunkan perolehan laba sebesar 2,147 miliar rupiah. Model ini memiliki nilai R-square sebesar 50,3% menunjukkan bahwa keragaman nilai dari laba 50,3% dipengaruhi oleh variabel dalam model 100 yaitu pembiayaan dan NPF, sedangkan 49,7% dipengaruhi oleh variable lain diluar model yang tidak dijelaskan dalam penelitian. Berdasarkan hasil pengujian uji F, menunjukkan bahwa pembiayaan dan NPF secara keseluruhan berpengaruh secara signifikan terhadap laba pada taraf nyata 5% dengan nilai p-value sebesar 0,021. Namun, secara parsial pengujian dengan uji t menunjukkan hanya pembiayaan yang berpengaruh secara signifikan terhadap laba dengan p-value sebesar 0,008 sedangkan secara parsial NPF tidak berpengaruh nyata terhadap laba.
2. Evi septi hernawati (2014), **Manajemen Risiko Pembiayaan di Baaitul Mal Wat Tamwil (BMT) Forsitama Kalitirto Berbah Sleman Yogyakarta**, hasil dari penelitian ini yaitu identifikasi dilakukan saat terjadi risiko pembiayaan yaitu nasabah sudah tidak mulai teratur membayar cicilan.

Teknik yang digunakan BMT dalam mengidentifikasi dengan survey dan wawancara ulang kepada nasabah. Rata-rata yang dialami nasabah adalah kegagalan dalam usaha sehingga terjadi pembayaran cicilan nasabah tidak teratur.

Pengukuran risiko BMT mengelompokan pembiayaan yang mengalami keterlambatan pembayaran menjadi 4 jenis yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Untuk mengukur kredit tidak produktif yaitu dengan cara 50% dari jumlah kredit lancar, 75% dari jumlah kredit yang diragukan, 100% dari jumlah kredit macet kemudian ditotal.

Pemantauan risiko BMT memantau kondisi usaha nasabah, jaminan rekening nasabah, pemantauan pelunasan angsuran dan memantau langsung kerumah nasabah. Selain itu BMT juga melakukan pemantauan secara administrative melalui laporan keuangan setiap bulanya. Upaya pengendalian yang dilakukan oleh BMT yaitu penetapan prosedur dan kebijakan pembiayaan, menggunakan asuransi jiwa, peningkatan kualitas SDM dan dan penagihan secara intensif.

Dari peneleitian terdahulu seperti yang tercantum di atas perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penelitian terdahulu yang berjudul analisis manajemen risiko pembiayaan dan pengaruhnya terhadap laba, dalam kasus ini penelitian terdahulu menerangkan tentang manajemen risiko dengan kaitan pengaruhnya terhadap laba, sedangkan penelitian yang akan dilakukan tidak menerangkan tentang pengaruhnya terhadap laba, melainkan menerangkan tentang kaitan manajemen risiko pembiayaan dalam rangka untuk menjaga likuiditas KJKS.

Kemudian penelitian terdahulu dengan judul Manajemen Risiko Pembiayaan di Baaitul Mal Wat Tamwil hanya menerangkan tentang Manajemen Risiko Pembiayaan saja, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti,

selain menerangkan penerapan manajemen risiko pembiayaan juga menerangkan tentang pengaruhnya dalam upaya menjaga likuiditas KJKS. Untuk itu peneliti akan mengangkat judul implementasi manajemen risiko pembiayaan dalam upaya menjaga likuiditas KJKS BINAMA Semarang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan fenomenologi interpretatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang dirancang untuk menuturkan, memahami, memperoleh dan menganalisis informasi tentang status gejala masyarakat, tata cara yang berlaku dan situasi-situasi tertentu dalam masyarakat, serta pengaruh dari fenomena yang terjadi di lapangan peneliti.¹⁰ Sedangkan Marzuki menyatakan penelitian deskriptif hanya akan melukiskan keadaan objek atau persoalannya dan tidak dimaksudkan untuk mengambil atau menarik kesimpulan yang berlaku umum.¹¹

Penelitian ini dipusatkan pada masalah tertentu dan dalam ruang lingkup tertentu sehingga dapat digolongkan dalam tipe pendekatan studi kasus (*case studies*). Sebagaimana diungkapkan bahwa studi kasus merupakan tipe pendekatan dalam penelitian yang penelaahannya pada satu kasus dilakukan secara mendalam, mendetail dan komperhensif.¹²

¹⁰ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalai Indonesia, 1985, h. 63.

¹¹ Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Ekonisia, 2005, h. 60

¹² Meleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005, h. 77

2. Objek Penelitian

Objek penelitian dilakukan di KJKS BINAMA yang beralamat di Jl. Tlogosari Raya Ruko Anda Kav. 5 Tlogosari Semarang. KJKS BINAMA Merupakan koperasi syaria'ah yang sedang berkembang dan telah memiliki banyak cabang di semarang maupun di luar semarang. Adapun alasan peneliti memilih objek di KJKS BINAMA karena dari hasil yang peneliti lakukan pada penelitian awal di KJKS BINAMA jumlah mitra dan outstanding pembiayaan di KJKS BINAMA setiap tahun selalu naik dan semakin besar. dengan jumlah pembiayaan yang semakin besar, maka tingkat risiko yang dihadapi oleh KJKS BINAMA juga semakin besar, sehingga peneliti berinisiatif untuk mengambil judul penerapan manajemen risiko pembiayaan dalam upaya menjaga liquiditas BMT.

3. Sumber Data

Data yang diambil penulis dalam skripsi ini adalah data mengenai penerapan manajemen risiko pembiayaan pada KJKS BINAMA Tlogosari Semarang. Sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh.¹³

Dalam penyusunan tugas akhir ini, klasifikasi data yang diperlukan terbagi kedalam:

a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambil data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Dengan data ini penulis mendapatkan

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Renika Cipta, 2010, h.

gambaran umum tentang KJKS BINAMA dan form yang terkait dengan pembiayaan yang meliputi: surat permohonan pembiayaan, surat pemeriksaan pembiayaan, surat pemeriksaan jaminan dan analisa kemampuan bayar, mengatasi risiko pembiayaan dan informasi tentang pembiayaan.

b. Data skunder

Yaitu data yang diperoleh dari pihak lain secara tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek peneliti yang berbentuk data dokumentasi. Data ini bisa didapat dari referensi dan brosur yang relavan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah:

a) Observasi

Observasi merupakan suatu proses pengamatan yang kompleks, dimana peneliti melakukan pengamatan langsung di tempat penelitian.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis akan melakukan observasi di KJKS BINAMA Tlogosari Semarang pada saat proses pembiayaan di KJKS BINAMA Tlogosari Semarang.

b) Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁵ Wawancara untuk memperoleh data akan penulis

¹⁴Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Walisongo Semarang*, Semarang, 2014, h. 13

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&R*, Bandung: Alfabeta, 2009, h. 231

lakukan terhadap bagian devisi pembiayaan dari KJKS BINAMA Tlogosari Semarang.

c) **Dokumentasi**

Dokumentasi adalah suatu kegiatan pengumpulan data dengan mengambil data yang telah tercatat atau terdata dalam suatu laporan atau pembukuan.¹⁶ Pendokumentasian yang peneliti lakukan adalah dengan merekam pembicaraan pada saat wawancara dengan devisi pembiayaan KJKS BINAMA.

Dokumen merupakan salah satu bukti meyakinkan suatu masalah yang biasanya berbentuk foto, surat, kaset, catatan, atau yang lain yang bisa digunakan sebagai bukti.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah di fahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.¹⁷ Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah deskriptif analisis. Deskripsi penelitian akan memaparkan data-data atau hasil-hasil penelitian melalui tehnik pengumpulan data di atas. Difokuskan pada penunjukan makna, deskriptif, penjernihan dan penempatan data pada konteksnya masing-masing dan seringkali melukiskanya dengan kata-kata dari pada dalam angka-angka.

¹⁶ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003, h. 79

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif,...* h. 244

Proses analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari obseravi, wawancara, dan dokumentasi.
2. Reduksi data, yaitu dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap didalamnya.
3. Menyusun data hasil reduksi, data tersebut disusun menjadi satuan-satuan yang kemudian dikategorisasikan kepada langkah berikutnya.
4. Pemeriksaan keabsahan data, yaitu data yang diperoleh perlu diperiksa kembali untuk memeriksa keabsahan data.
5. Melakukan penafsiran data dalam mengelola hasil sementara menjadi teori substantif.¹⁸

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai isi tugas akhir ini dan agar mudah dipahami, maka diperlukan suatu sistematika penulisan yang sederhana sehingga pembaca tidak kesulitan dalam membaca maupun memahami isi dari tugas akhir ini. Sistematika penulisan ini merupakan suatu pembahasan secara garis besar dari bab-bab yang akan di bahas, sistematika penulisan skripsi ini adalah:

Bab pertama, merupakan Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, dan rumusan masalah yang menguraikan permasalahan-permasalahan yang terjadi serta hal-hal yang melatarbelakangi permasalahan tersebut, sehingga penyusun merasa tertarik untuk mengkajinya. Tujuan dan manfaat penelitian yang di

¹⁸ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*,, h. 73

maksudkan dalam penelitian ini, yaitu agar rangkaian kegiatan penelitian yang penyusun lakukan tidak menjadi kegiatan yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Tinjauan pustaka. Sedangkan metode penelitian berfungsi sebagai pemandu secara teknis dalam penelitian ini, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

Bab kedua, dalam bab kedua ini menguraikan tinjauan umum tentang Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah, dalam tinjauan umum tersebut di dalamnya akan menguraikan tentang pengertian, sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, serta produk-produk Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah. Selanjutnya tentang manajemen risiko pembiayaan, yang di dalamnya akan menguraikan tentang definisi manajemen, unsure dan fungsi manajemen, pengertian risiko, macam-macam risiko perbankan, tinjauan umum manajemen risiko. Selanjutnya membahas tentang risiko pembiayaan yang di dalamnya akan menguraikan tentang definisi pembiayaan, Jenis Pembiayaan, Pengertian Risiko Pembiayaan, Risiko pembiayaan, Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan. Kemudian likuiditas koperasi syari'ah, yang didalamnya menguraikan Pengertian Likuiditas, Penilaian Likuiditas. Kemudian membahas tentang hubungan manajemen risiko pembiayaan dengan likuiditas bank syari'ah.

Bab ketiga, adalah bab yang memaparkan Data Hasil Penelitian, yang meliputi: Sejarah Singkat KJKS BINAMA Semarang, Visi dan Misi KJKS BINAMA Semarang, Manajemen KJKS BINAMA Semarang, Struktur KJKS BINAMA Semarang, implementasi manajemen risiko pembiayaan KJKS BINAMA Semarang .

Bab keempat, berisi analisis data hasil penelitian, yang didalamnya meliputi : analisis pemasaran pembiayaan, analisis prosedur pemberian pembiayaan, analisis monitoring pembiayaan, analisis pengelolaan dan penyelesaian pembiayaan

bermasalah, analisis implementasi manajemen risiko pembiayaan dalam upaya menjaga likuiditas KJKS BINAMA Semarang.

Bab kelima, merupakan penutup dari rangkaian pembahasan yang terdiri dari kesimpulan, saran dan penutup.